



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

**KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas Taufik dan HidayahNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini merupakan Laporan Kinerja kewajiban tahunan, berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati Hulu Sungai Tengah paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir, sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan diperjelas melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada tiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dengan melakukan pengukuran kinerja evaluasi serta pengungkapan permasalahan yang dihadapi oleh SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika, Evaluasi terhadap realisasi program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan, sebagai pertanggungjawaban instansi pemerintah.

Atas hal tersebut maka Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada awal tahun anggaran 2023 ini membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) atas kinerja yang dilaksanakan dalam tahun anggaran 2022 yang lalu dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini disusun, untuk menjadi bahan evaluasi dan informasi kepada publik secara keseluruhan terhadap Perjanjian Kinerja, program serta kegiatan yang sudah dilaksanakan berikut permasalahannya, semoga bermanfaat bagi kemajuan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan dari semua pihak, demi penyempurnaan penyusunan laporan ini di tahun-tahun mendatang.

Barabai, 20 Februari 2023  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Hulu Sungai Tengah



DINAS  
KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA

**Ir. H. AHMAD SYAHRANI EFFENDI, MT**  
NIP. 19660518 199303 1 006

# DAFTAR ISI

|  | <i>Halaman</i> |
|--|----------------|
| KATA PENGANTAR.....                        | i              |
| DAFTAR ISI.....                            | ii             |
| BAB I PENDAHULUAN.....                     | 1              |
| 1.1. Latar Belakang.....                   | 1              |
| 1.2. Landasan Hukum .....                  | 1              |
| 1.3. Gambaran Umum Organisasi.....         | 2              |
| 1.4. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi..... | 2              |
| 1.5. Struktur Organisasi .....             | 3              |
| 1.6. Aspek strategis Organisasi.....       | 5              |
| 1.7. Permasalahan Utama yang dihadapi..... | 6              |
| 1.8. Sistematika Penulisan.....            | 6              |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA .....           | 8              |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....        | 9              |
| 3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....      | 9              |
| 3.2. Realisasi Anggaran .....              | 23             |
| BAB IV PENUTUP.....                        | 28             |
| 4.1 Kesimpulan .....                       | 28             |
| 4.2 Upaya Peningkatan Kinerja.....         | 29             |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki 3 (tiga) landasan utama meliputi : transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kewajiban organisasi dalam rangka akuntabilitas diatas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam melaksanakan tugas pokok perlu menyusun Laporan Kinerja di akhir tahun pelaksanaan kinerja selama Tahun 2022 sesuai dengan program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun (RKT) 2022, sehingga Laporan Kinerja merupakan sarana pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai tolok ukur dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat di bidang komunikasi dan informatika.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) di Indonesia.

Agar mencapai hasil (*outcome*) yang optimal, maka program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah dianggarkan melalui APBD/P-APBD tahun 2022 sesuai visi dan misi, tujuan, sasaran, indikator dan tolok ukur kinerja kegiatan serta rencana tingkat capaian program kegiatan (target kinerja) dapat terlaksana dengan baik.

#### **1.2. LANDASAN HUKUM**

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu sungai tengah 2022 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pasal 3 ayat 1 dan penjelasan SOPD pada ayat 2 dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi & informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang berkedudukan di jalan Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Benawa Tengah Kec. Barabai Telp. (0517) 3790845 Fax (0517) 3790281 *E-mail* : [diskominfo@hulusungaitengahkab.go.id](mailto:diskominfo@hulusungaitengahkab.go.id), melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan dibidang komunikasi & informatika, statistic dan persandian yang bertanggungjawab kepada Bupati Hulu Sungai Tengah.

#### **1.4. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

##### **1.4.1. Kedudukan**

Kedudukan posisi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam struktur Perangkat Daerah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, bidang persandian dan statistik yang menjadi kewenangan daerah, sebagaimana pada ayat 1 dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

##### **1.4.2. Tugas Pokok**

Tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

##### **1.4.3. Fungsi**

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyelenggarakan Fungsi:

1. Pengekoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik; Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Komunikasi dan Informatika, statistic dan persandian;
2. Penyelenggaraan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
4. Penyelenggaraan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **1.5. STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, struktur dan susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah sebagai berikut :

1. Kepala SKPD

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan eselon II.b, Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

2. Sekretaris

Sekretaris Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan eselon III.A, membawahi 2 (dua) sub bagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian (eselon IV,a) sebagai berikut:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan

3. Bidang-bidang

Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdapat 2 (dua) bidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan eselon III.B yaitu :

- a. Bidang Komunikasi, Informasi Publik dan Statistik
- b. Bidang Informatika dan Persandian

4. Unit Pelayanan Teknis

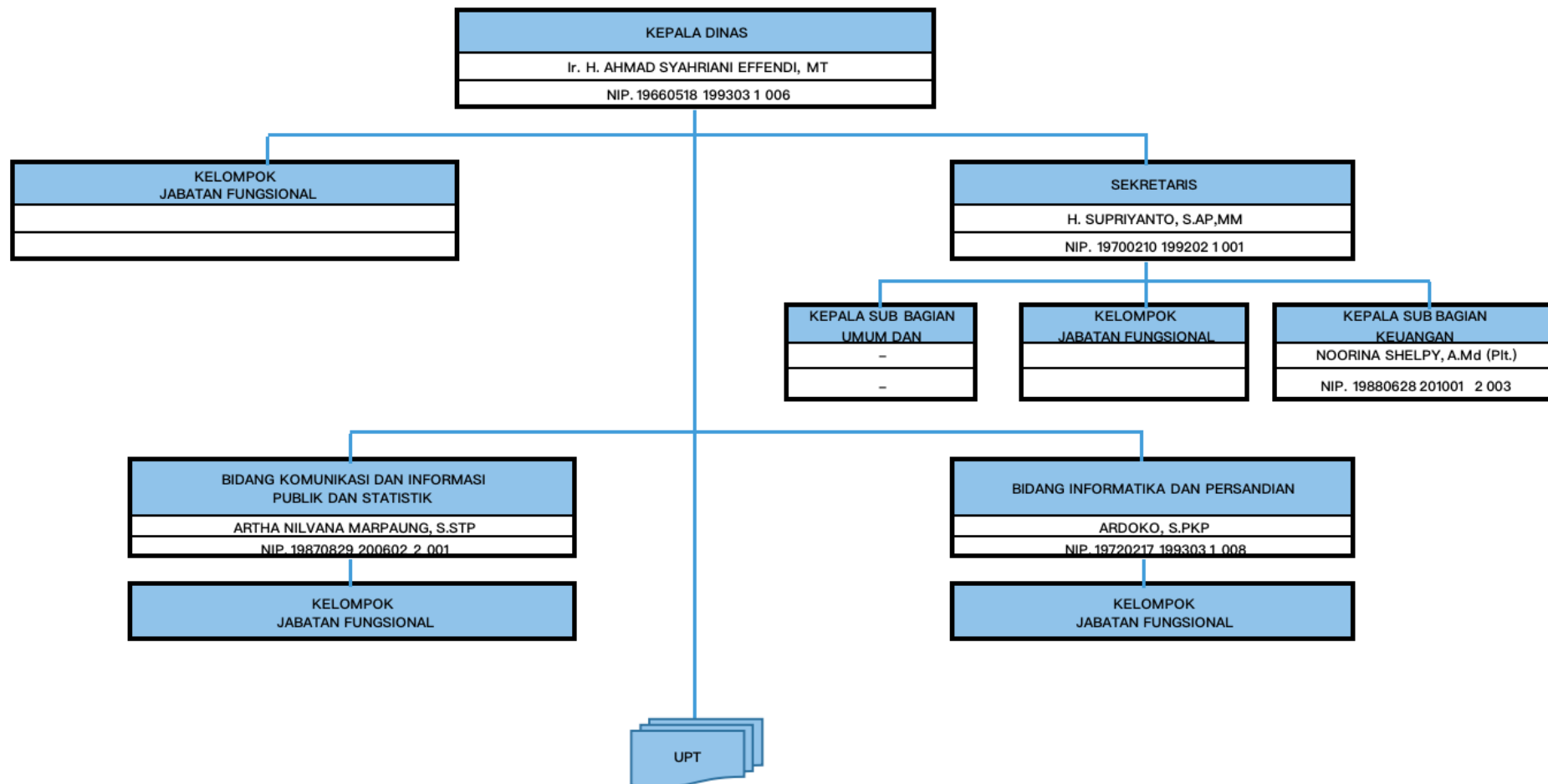
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah dipimpin oleh Kepala Dinas dengan dibantu oleh satu orang Sekretaris Dinas dan 2 Kepala Bidang.

Adapun staf yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah seluruhnya berjumlah 19 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 12 orang dan kontrak sebanyak 7 orang.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah secara jelas dapat dilihat pada gambar berikut :

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH



## **1.6. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

### **URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Urusan Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu urusan yang pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang mendukung penerapan Pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (ICT) atau e-Government. Melalui urusan Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah memastikan ketersediaan infrastruktur jaringan intranet/internet di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang merupakan sekumpulan komponen fiskal dan logikal yang menyediakan dasar untuk konektivitas keamanan, routing, pengaturan, akses dan fitur integral pada jaringan yang merupakan dasar dalam pelaksanaan pemerintahan berbasis teknologi informasi. Dengan demikian penerapan konsep e-Government dapat diterapkan di Kabupaten Badung serta keterbukaan informasi publik bisa lebih cepat, tepat dan transparan. Selain hal tersebut melalui urusan kominfo Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan, salah satunya melalui pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat melalui informasi.

□

### **URUSAN STATISTIK**

Urusan Statistik merupakan urusan yang dilaksanakan oleh dinas komunikasi dan Informatika yang memiliki tugas pokok fungsi menyiapkan data statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan kebutuhan manajemen kebijakan. Setiap tahunnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyajikan Dokumen Statistik Sektoral yang berisi data statistik bersifat spesifik, terukur, terjangkau, relevan sesuai masa waktunya. Selain itu juga berguna untuk mengevaluasi dampak kebijakan pembangunan.

□

### **URUSAN PERSANDIAN**

Urusan persandian berperan melakukan upaya melindungi keamanan informasi milik Pemerintah Kabupaten Badung, baik rahasia maupun terbuka, serta mendukung kegiatan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap ancaman yang timbul pada kepentingan dan keamanan Daerah



Berdasarkan analisis terhadap berbagai macam permasalahan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah maka isu strategis yang mengemuka di bidang komunikasi dan informatika, yang dapat memberikan manfaat/pengaruh terhadap pelayanan public yang lebih baik.

1. Belum optimalnya layanan penyebaran informasi dan komunikasi pemerintahan
2. Belum optimalnya penerapan e-Government
3. Belum optimalnya layanan statistik sektoral
4. Belum optimalnya Pengamanan Informasi dan Persandian
5. Belum optimalnya akuntabilitas dan Kinerja Diskominfo

#### **1.7. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI**

1. Kurangnya akses dan kualitas informasi publik
2. Masih rendahnya penerapan e gov perangkat daerah
3. Belum lengkapnya data statistik sektoral daerah
4. Belum optimalnya Pengelolaan Pengamanan Informasi dan Persandian;
5. Manajemen perencanaan, keuangan, Kepegawaian, Barang Milik Daerah, dan kinerja perangkat daerah belum terkelola dengan maksimal

#### **1.8. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penyusunan LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini menjelaskan latar belakang yang berisikan gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya yang ada, Pelayanan dan sistematika penulisan

##### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bagian ini menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

##### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

###### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

#### **B. REALISASI ANGGARAN**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja untuk anggaran tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah di dasarkan pada Perjanjian kinerja yang merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, diharapkan akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022 ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2021 - 2026 adalah sebagaimana tabel dibawah ini

| No | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja   | Satuan | Target | Penanggungjawab                                      |
|----|--|---|--------|--------|--|
| 1  | Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi pemerintahan                | Persentase Informasi dan Komunikasi Pemerintahan yang disebarakan | %      | 70     | Bidang Komunikasi dan Informasi Publik dan Statistik |
| 2  | Meningkatnya penerapan e-Government  | Presentase perangkat daerah yang menerapkan e gov                 | %      | 90     | Bidang Komunikasi dan Informasi Publik dan Statistik |
| 3  | Meningkatnya pengelolaan Statistik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah | Persentasi ketersediaan data statistik sektoral terintegrasi      | %      | 100    | Bidang Informatika dan Persendian                    |
| 4  | Meningkatnya Pengamanan Informasi dan Persandian                             | Persentase Kasus keamanan informasi yang tertangani               | %      | 100    | Bidang Informatika dan Persendian                    |
| 5  | Meningkatnya akuntabilitas dan Kinerja Diskominfo                            | nilai saki<br>Diskominfo  | indeks | 1,77   | Sekretariat  |
|    |  | persentase penyerapan anggaran                                    | %      | 80     | Sekretariat  |

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

Sesuai amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah selaku pengemban amanah Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah melaksanakan kewajiban untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban yang dilaksanakan.

LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2022. Dengan disusunnya LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari kelompok indikator masing – masing urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan urusan Persandian. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung tahun 2022, terdapat 5 (lima) sasaran serta 6 (enam) indikator yang dievaluasi dan dianalisis pencapaian kerjanya untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab – sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

**3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika**

Pengukuran capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022 dengan realisasinya, membandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya serta capaian target resnstra sampai dengan tahun berjalan.

Tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2022 berdasarkan pengukurannya dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel : Capaian Indikator Kinerja

| NO | Sasaran Kinerja  | Indikator Kinerja   | Capaian Tahun 2021 | Tahun 2022 |           |         | Target Akhir RPJMD/REns tra (2026) | Capaian s.d 2022 terhadap 2026 (%) |
|----|--|---|--------------------|------------|-----------|---------|------------------------------------|------------------------------------|
|    |  |   |                    | Target     | Realisasi | %       |                                    |                                    |
| 1  |  | 2   | 3                  | 4          | 5         | 6       | 7                                  | 8=(5/7)*100                        |
| 1. | Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi pemerintahan                | Persentase Informasi dan Komunikasi Pemerintahan yang disebarakan | 60%                | 70%        | 70%       | 100%    | 100%                               | 70%                                |
| 2. | Meningkatnya penerapan e-Government  | Presentase perangkat daerah yang menerapkan e gov                 | 30%                | 38%        | 38%       | 100%    | 100%                               | 38%                                |
| 3. | Meningkatnya pengelolaan Statistik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah | Persentasi ketersediaan data statistik sektoral terintegrasi      | 100%               | 100%       | 100%      | 100%    | 100%                               | 100%                               |
| 4. | Meningkatnya Pengamanan Informasi dan Persandian                             | Persentase Kasus keamanan informasi yang tertangani               | 100%               | 100%       | 100%      | 100%    | 100%                               | 100%                               |
| 5. | Meningkatnya akuntabilitas dan Kinerja Diskominfo                            | nilai sakiip Diskominfo   | 78,74              | 79         | 81,34     | 104,3%  | 85                                 | 95,69                              |
|    |  | persentase penyerapan anggaran                                    | 82,20%             | 80%        | 80,10%    | 100,13% | 90%                                | 89%                                |

### **3.1.1. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

Berdasarkan tabel 3.1 diatas secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022. Terdapat , 5 (lima) sasaran strategis dan 6 (enam) Indikator Kinerja yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah, lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian-uraian berikut.

#### **3.1.1.1 Sasaran : Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi pemerintahan**

Berangkat dari permasalahan strategis : Belum optimalnya layanan penyebaran informasi dan komunikasi pemerintahan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah menentukan sasaran strategis : Meningkatnya Penyebaran Informasi dan Komunikasi Pemerintahan dengan Indikator : Persentase Informasi dan Komunikasi Pemerintahan yang disebarakan.

##### **3.1.1.1 Target dan realisasi**

Target kinerja pada tahun 2022 ditentukan sebesar 70% dengan capaian kinerja 70%, yang bermakna bahawa telah tercapai target untuk tahun ini yaitu 100%. Penentuan target untuk tahun 2022 sebesar 70% memang masih dapat didiskusikan untuk mendapatkan target yang logis, hal ini salah satunya disebabkan karena pada tahun ini dilakukan riview renstra dengan penyesuaian sasaran strategis dan indikator sasarannya. Capaian sebesar 70% pun perlu didiskusikan lebih lanjut karena sementara ini masih bersifat asumsi, sehingga belum didapatkan data yang obyektif dengan tingkat kepercayaan yang memadai.

##### **3.1.1.2 Realisasi tahun ini dan tahun sebelumnya**

Dibanding capaian tahun sebelumnya (2021) terdapat kenaikan sebesar 10% dari 60% menjadi 70%.

##### **3.1.1.3 Realisasi tahun ini dibanding target akhri Renstra**

Untuk memenuhi target akhir tahun renstra sebesar 100% masih diperlukan peningkatan sebesar 30%.

##### **3.1.1.4 Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan**

Capaian kinerja yang meningkat dapat dimaknai sebagai suatu keberhasilan meskipun masih perlu dievaluasi dari sisi kualitasnya. Era digital menjadi faktor yang memudahkan tercapainya target penyebarluasan informasi, dimana semua jenis informasi dapat langsung disebarluaskan melalui media digital.

Berikut berbagai media penyebarluasan informasi pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah :

hulusungaitengahkab.go.id (situs resmi pemda hst)

**- Berita Terbaru -**

Berita Terbaru Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

WAKIL BUPATI HST HADIRI MUSRENBANG KEC...  
07-02-2023

BUPATI HST HADIRI PERINGATAN HARI GIZI ...  
25-01-2023

PEMKAB HST GELAR APEL KESIAPSIAGAAN ANT...  
12-01-2023

mediacenterkabhst

BERANDA TENTANG KONTAK KAMI Selasa, 14 Februari 2023

**MEDIA CENTER**  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

BERITA HOAX PENGUMUMAN VIDEO

Berita Terbaru Wakil Bupati HST Hadiri Musrenbang Kecamatan Batang Abai Utara Bupati HST Hadiri Peringatan Hari Gizi Nasional ke-63 Pemkab HST Gelar

Awal Tahun, Bupati Aulia Oktafiandi Lantik 6 Pejabat Tinggi Pratama, Siapa Saja, Simak Datanya

HOAX

[SALAH] Daftar Kandungan Bahan Kimia Berbahaya dalam Vaksin Covid-19

[SALAH] Vaksin mRNA Sebarkan Komorbid Pada Lansia

Rp500.000 bagi yang Mempunyai F-KTP

[SALAH] Pemesanan Online Vaksin Covid-19 Sinopharm Melalui E-Commerce

Awasi Hoaks Gagal Jantung hingga Strok adalah Gejala Omicron

UPDATE INFORMASI PENGUMUMAN 07-11-2022

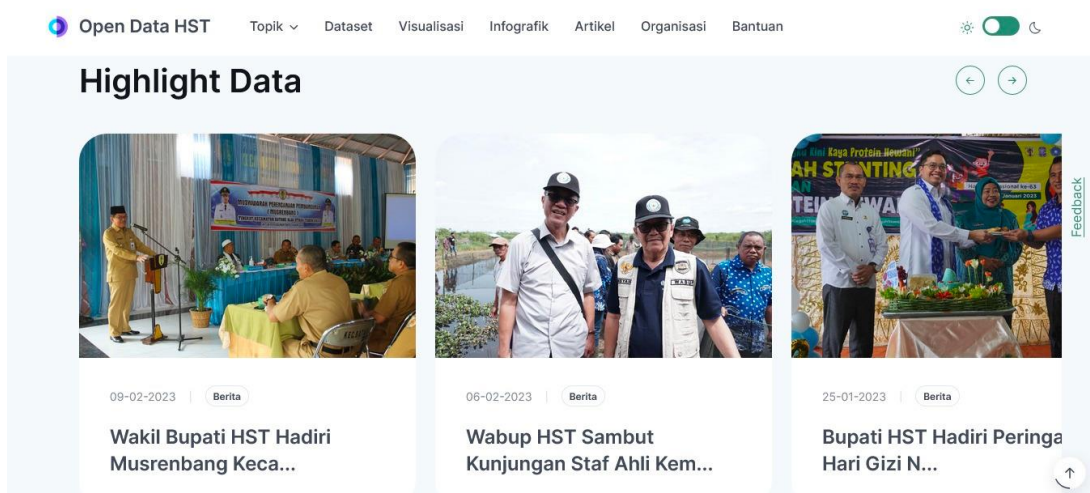
Instagram dikominfo



facebook

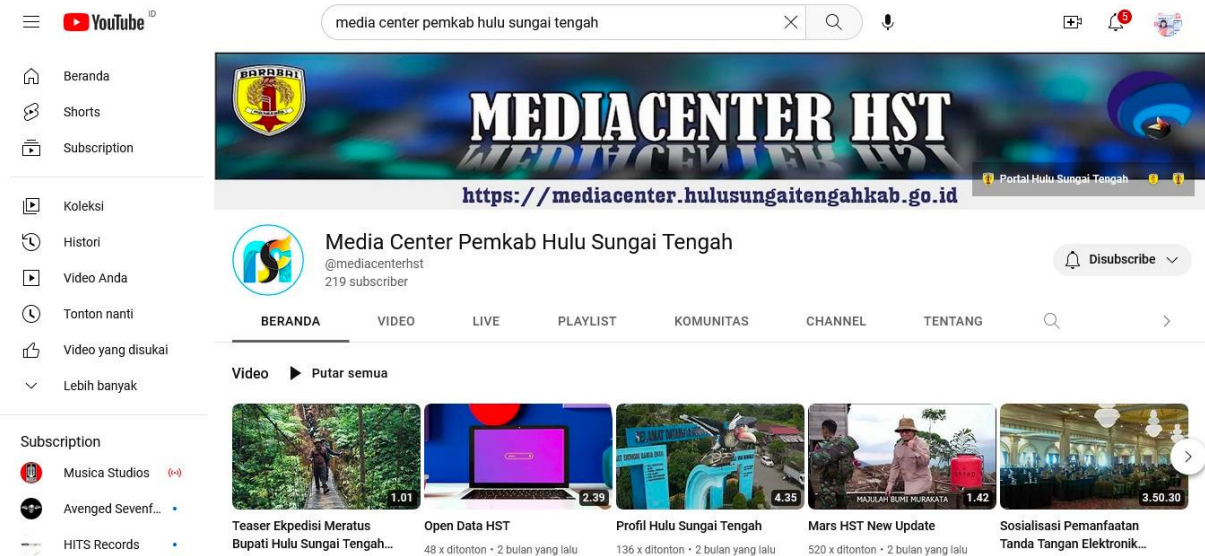


Portal Open Data



Youtube





### 3.1.1.5 Efisiensi penggunaan sumberdaya

Dari sisi sumberdaya manusia Bidang Komunikasi Informasi Publik dan Statistik hanya mempunyai 4 (empat) tenaga, yaitu : 1 (satu) orang Kabid, 1 (satu) orang ASN analis Statistik dan 2 (dua) orang tenaga peliputan dengan status tenaga kontrak. Jumlah ini sangatlah minim jika dibandingkan daerah/kabupaten tetangga yang mempunyai puluhan tenaga dalam satu bidang.

Sumberdaya keuangan/anggaran pada tahun 2022 berjumlah Rp. 2.211.063.800,- terealisasi sebesar Rp. 1.711.356.016, atau 77,40%. Hal ini dapat dimakanai terdapat efisiensi serapan anggaran sebesar 22,6%

### 3.1.1.6 Program/Kegiatan yang menunjang

Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, merupakan hasil dari dukungan program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2022 yaitu :

#### PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- ❖ Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
- ❖ Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
- ❖ Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- ❖ Pelayanan Informasi Publik
- ❖ Layanan Hubungan Media
- ❖ Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
- ❖ Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
- ❖ Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

### 3.1.2 Sasaran : Meningkatnya penerapan e-Government



Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mendorong peningkatan penerapan e-government adalah Optimalisasi Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Optimalisasi Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Penguatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah, Penguatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah, Penguatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah, dan Penguatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.

#### 3.1.2.1 Target dan realisasi

Sasaran Kinerja Meningkatnya penerapan e government menggunakan ukuran atau indikator presentase perangkat daerah yang menerapkan e-government, sampai dengan saat ini belum menemukan cara pengukuran indikator yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan, sehingga cara perhitungan capaian kinerja pun bersifat asumtif.

Untuk tahun 2022 target ditentukan sebesar 38% dan tercapai 38% atau capaian target 100%.

#### 3.1.2.2 Realisasi tahun ini dan tahun sebelumnya

Pada tahun 2021 capaian target sasaran kinerja ini sebesar 30%, yang berarti terdapat kenaikan sebesar 8% di tahun 2022 dengan capaian 38%.

### 3.1.2.3 Realisasi tahun ini dibanding target akhir Renstra

Walaupun terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya, untuk mencapai target capaian akhir tahun renstra yang ditetapkan sebesar 100% masih perlu dilakukan upaya-upaya yang optimal, karena untuk mencapai angka 100% masih perlu 62 % lagi dengan sisa waktu kurang dari 3 (tiga ) tahun.

### 3.1.2.4 Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

Kualitas Sumber Daya manusia menjadi salah satu faktor penentu dalam mencapai target sasaran kinerja ini. Totalitas dalam bekerja adalah kata kuncinya.

### 3.1.2.5 Efisiensi penggunaan sumberdaya

Seperti dalam uraian penyebab keberhasilan di atas kualitas SDM menjadi bukti efisiensi sumberdaya manusia, ditengah keterbatasan/kekurangan kuantitas/jumlah SDM dimana sampai dengan tahun 2022 Bidang Informatika dan Persandian hanya didukung oleh 6 (enam) SDM yaitu : 1 (satu) Kabid, 2 (dua) ASN, dan 3 (tiga) tenaga kontrak.

Dari sisi anggaran dengan total pagu sebesar RP. 4.053.693.150,- dengan realisasi sebesar RP. 3.216.500.430, atau 79,35%. Dari presentase realisasi anggaran tersebut dapat dimaknai terjadi efisiensi serapan anggaran sebesar 20,65% atau Rp. 837.192.720,-

### 3.1.2.6 Program/Kegiatan yang menunjang

Pada tahun 2022 Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang mendukung capain sasaran kinerja tersebut adalah :

#### PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan :

- ❖ Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan subkegiatan :

- ❖ Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten
- ❖ Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

- ❖ Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
- ❖ Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
- ❖ Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

### **3.1.3 Sasaran : Meningkatnya pengelolaan Statistik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah**

Dalam upaya meningkatkan pengelolaan statistik dalam penyelenggaraan pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan upaya sinergitas dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai pembina data dan seluruh perangkat daerah sebagai produsen data guna menghasilkan data statistik yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan.

#### **3.1.3.1 Target dan realisasi**

Dengan indikator sasaran : Persentasi ketersediaan data statistik sektoral terintegrasi, pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 100%. Dengan upaya yang optimal ditengah keterbatasan dapat dicapai target sebesar 100%

#### **3.1.3.2 Realisasi tahun ini dan tahun sebelumnya**

Capaian 100% untuk sasaran ini terjadi juga ditahun sebelumnya (2021), dimana ditahun tersebut juga tercapai 100%

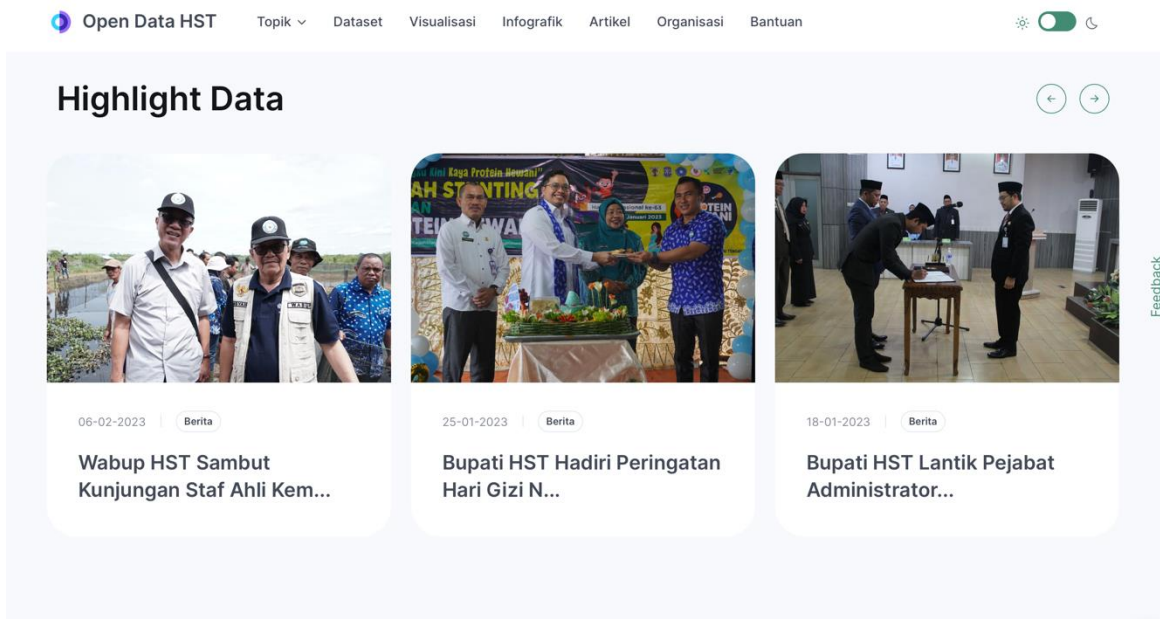
#### **3.1.3.3 Realisasi tahun ini dibanding target akhir Renstra**

Upaya yang terus-menerus tentunya sangat diperlukan dan rangka mempertahankan capaian sampai dengan akhir tahun renstra yang ditargetkan sebesar 100%

#### **3.1.3.4 Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan**

Sinergitas dengan semua pemangku kepentingan menjadi faktor utama dalam keberhasilan ini, dengan selalu menjalin komunikasi dan membina harmonisasi secara berkelanjutan.

Upaya tersebut terbukti efektif dengan diluncurkannya portal open data HST oleh Bupati Hulu Sungai Tengah dalam apel gabungan perangkat daerah. Portal ini dapat diakses melalui laman :<https://opendata.hulusungaitengahkab.go.id> (LINK WEBSITE).



### 3.1.3.5 Efisiensi penggunaan sumberdaya

Dengan jumlah personil hanya 1 (satu) orang sudah cukup sebagai bukti akan efisiensi Sumber Daya Manusia dalam sasaran strategis ini.

Dukungan anggaran sebesar RP. 94.406.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 24.532.950,- atau 25,99% juga membuktikan adanya efektifitas penggunaan anggaran sebesar 74,01% dengan capaian target yang maksimal yaitu 100%

#### 3.1.3.6 Program/Kegiatan yang menunjang

Dukungan Program, Kegiatan dan Subkegiatan untuk menunjang sasaran kinerja statistik di tahun 2022 adalah :

#### PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan :

- ❖ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral
- ❖ Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
- ❖ Membangun Metadata Statistik Sektoral

#### 3.1.4 Meningkatnya Pengamanan Informasi dan Persandian

Penyelenggaraan urusan persandian menyangkut pengamanan informasi publik; bukan hanya jaminan keamanan terhadap aspek kerahasiaan tetapi terhadap aspek keutuhan, keotentikan dan nir penyangkalan; pelayanan kepada pimpinan daerah dan perangkat daerah termasuk staf; pengamanan bukan hanya di kamar sandi; tetapi juga mendukung pengamanan TIK; kolaborasi dengan sistem keamanan informasi.

##### 3.1.4.1 Target dan realisasi

Indikator kinerja sasaran Meningkatnya Pengamanan Informasi dan Persandian adalah Persentase Kasus keaamanan informasi yang tertangani dengan target 100%.

Pada tahun 2022 seluruh kasus keamanan informasi telah dapat tertangani. Dengan demikian capaian kerjanya adalah 100%.

##### 3.1.4.2 Realisasi tahun ini dan tahun sebelumnya

Penanganan kasus keamanan informasi adalah salah satu prioritas pelaksanaan e-government, sehingga upaya penanganan yang optimal dilakukan sepanjang waktu. Seperti pada tahun 2021 pun kasus tersebut tertangani 100%

##### 3.1.4.3 Realisasi tahun ini dibanding target akhir Renstra

Komitmen dan upaya maksimal untuk selalu sigap dalam penanganan kasus keamanan informasi selalu dituntut sampai dengan akhir tahun renstra yang menargetkan penanganan seluruh kasus/100%.

#### 3.1.4.4 Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

Skill dan attitude SDM adalah sebuah keniscayaan untuk memperoleh hasil kinerja yang maksimal, dengan mengesampingkan keterbatasan kuantitas.

#### 3.1.4.5 Efisiensi penggunaan sumberdaya

Seperti pada sasaran kinerja lainnya diatas, untuk sasaran ini juga terdapat keterbatasan SDM, di mana hanya ada 1 (satu)orang ASN dibantu tenaga kontrak untuk menangani setiap kasus keamanan informasi.

Anggaran yang tersedia pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 129.344.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 86.057.493,- atau 66,53% yang berarti terdapat efisiensi serapan anggaran sebesar 33,47% atau Rp. 43.286.907,-

#### 3.1.4.6 Program/Kegiatan yang menunjang

Dukungan program, kegiatan dan subkegiatan untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut :

#### PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sukegiatan :

- ❖ Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

### 3.1.5 Meningkatnya akuntabilitas dan Kinerja Diskominfo

Sasaran kinerja Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja diskominfo merupakan urusan penunjang yang memegang peranan penting dalam kelancaran seluruh operasioanal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Perhatian serius dan dukungan pimpinan mutlak diperlukan dalam mewujudkan setiap sasaran kinerja yang ada di institusi.

#### 3.1.5.1 Target dan realisasi

Seiring dengan dilakukannya riview renstra diskominfo, target dan indikator sasaran kinerja urusan penunjang juga mengalami penyesuaian. Indikator kinerja untuk urusan penunjang ini adalah

- ❖ nilai sakip Diskominfo dengan target 79 dengan realisasi 81,34 atau 104,3%

- ❖ persentase penyerapan anggaran dengan target 80% dengan realisasi 80,10% atau 100,3% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2022

#### 3.1.5.2 Realisasi tahun ini dan tahun sebelumnya

Perbandingan dengan tahun sebelumnya menunjukkan bahwa :

Untuk nilai sikip terdapat kenaikan sebesar 2,6 dari 78,74 ditahun 2021 menjadi 81,34 ditahun 2022, Dengan demikian terjadi peningkatan katagori dari BB (Sangat Baik) menjadi A (Memuaskan)

Realisasi serapan anggaran mengalami penurunan dari 82,20% ditahun 2021 menjadi 80,10% ditahun 2022.

#### 3.1.5.3 Realisasi tahun ini dibanding target akhir Renstra

Target nilai sikip diakhir tahun renstra adalah 85 (memuaskan), dengan demikian sampai dengan tahun ini telah tercapai 95,69%, sebuah angka yang logis untuk dapat dicapai di tahun 2026.

Target realisasi serapan anggaran sebesar 90% diakhir tahun renstra, tercapai 89% ditahun ini. Berkaca dari tahun sebelumnya yang terjadi penurunan, maka komitmen menjaga stabilitas serapan anggaran merupakan pekerjaan rumah yang perlu mendapatkan perhatian yang serius.

#### 3.1.5.4 Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

Kebersamaan dan terjalannya harmonisasi dalam mencapai tujuan organisasi adalah kondisi yang patut dipertahankan. Mengedepankan kesamaan pandang ditengah dinamika dan keanekaragaman pola fikir adalah hal lain yang perlu terus mendapat perhatian.

Semakin meningkatnya pagu anggaran menjadikan penjadwalan pelaksanaan kegiatan ditengah keterbatasan sumberdaya manusia perlu terus diperhatikan, karena kelengahan akan hal tersebut menjadikan serapan anggaran ditahun 2022 menurun dibanding tahun sebelumnya.

#### 3.1.5.5 Efisiensi penggunaan sumberdaya

Dinas Komunikasai dan Informatika menerapkan pola “kerja bersama” dengan meminimalisir ego bidang, dengan kenyataan bahwa 1 (satu) orang bisa mengemban 4 - 5 tugas.

Capaian serapan anggaran di satu sisi adalah menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan yang bermakna bahwa semakin tinggi serapan anggaran, semakin baik kinerja keuangan. Tapi disisi lain rendahnya serapan anggaran menunjukkan efektifitas penggunaan anggaran tersebut (walaupun pendapat ini masih perlu diuji).



Pada tahun 2022 serapan anggaran 80,10% dapat dimaknai terjadi efektifitas serapan anggaran sebesar 19,9%

### 3.1.5.6 Program/Kegiatan yang menunjang

#### PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan subkegiatan :

- ❖ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- ❖ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan subkegiatan :

- ❖ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan Administrasi Kepegawaian PD dengan subkegiatan :

- ❖ Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan subkegiatan :

- ❖ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- ❖ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- ❖ Penyediaan Barng Cetakan dan Penggandaan
- ❖ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- ❖ Fasilitasi Kunjungan Tamu
- ❖ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan subkegiatan :

- ❖ Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan subkegiatan :

- ❖ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- ❖ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- ❖ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan subkegiatan :

- ❖ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- ❖ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- ❖ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- ❖ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

### 3.2 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Kebijakan Keuangan yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2022 dan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2022, Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Hulu Sungai Tengah adalah sebesar Rp 7.466.714.508,- (80,10%) yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 6.601.962.148,-( 78,39%) dan belanja modal sebesar Rp 864.752.360,-(96,07%), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tahun 2022 total dianggarkan Rp. 9.322.063.991,- dengan rincian :
  - a. Belanja Operasi Rp. 8.421.942.575,-
  - b. Belanja Modal Rp. 900.121.416,-
2. Realisasi serapan untuk mewujudkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Hulu Sungai tengah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 7.466.714.508,- (80,10%) dengan Rincian sebagai berikut :
  - a. Belanja Operasi Rp. 6.601.962.148,-( 78,39%)
  - b. Belanja Modal Rp. 864.752.360,-(96,07%)

Rincian anggaran beserta realisasinya masing-masing kegiatan pada belanja langsung adalah pada tabel berikut ini

| URAIAN  | ANGGARAN             | TOTAL                | %            |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>                       | <b>2,831,456,641</b> | <b>2,427,707,069</b> | <b>85.74</b> |
| <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | 10,092,800           | 9,949,000            | 98.58        |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | 4,183,200            | 4,079,400            | 97.52        |

**Bab. III**  
**Akuntabilitas Kinerja**

|  |                      |                      |              |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 5,909,600            | 5,869,600            | 99.32        |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | 1,838,144,941        | 1,518,461,886        | 82.61        |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | 1,838,144,941        | 1,518,461,886        | 82.61        |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>   | 4,677,800            | 4,595,800            | 98.25        |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian  | 4,677,800            | 4,595,800            | 98.25        |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | 262,844,100          | 204,122,036          | 77.66        |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | 4,056,700            | 4,017,400            | 99.03        |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | 29,154,500           | 28,051,600           | 96.22        |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | 11,031,900           | 11,030,900           | 99.99        |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | 7,695,000            | 7,560,000            | 98.25        |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu  | 35,020,000           | 32,523,750           | 92.87        |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 175,886,000          | 120,938,386          | 68.76        |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | 136,508,100          | 135,487,300          | 99.25        |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | 136,508,100          | 135,487,300          | 99.25        |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | 264,515,000          | 249,958,757          | 94.50        |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 4,985,000            | 3,762,000            | 75.47        |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 74,406,000           | 67,181,201           | 90.29        |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 185,124,000          | 179,015,556          | 96.70        |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     | 314,673,900          | 305,132,290          | 96.97        |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 85,077,900           | 77,894,890           | 91.56        |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 13,116,000           | 11,845,000           | 90.31        |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | 18,900,000           | 18,897,000           | 99.98        |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                     | 197,580,000          | 196,495,400          | 99.45        |
| <b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>   | <b>2,211,063,800</b> | <b>1,711,356,016</b> | <b>77.40</b> |
| <b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                              | 2,211,063,800        | 1,711,356,016        | 77.40        |
| Monitoring Opini dan Aspirasi Publik   | 264,376,000          | 51,081,754           | 19.32        |

**Bab. III**  
**Akuntabilitas Kinerja**

|   |                      |                      |              |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik  | 21,276,800           | 2,400,000            | 11.28        |
| Pengelolaan Media Komunikasi Publik   | 69,587,000           | 45,467,412           | 65.34        |
| Pelayanan Informasi Publik  | 1,203,070,200        | 1,051,009,550        | 87.36        |
| Layanan Hubungan Media  | 316,232,900          | 245,785,700          | 77.72        |
| Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan   | 3,660,000            | 0                    | 0.00         |
| Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik   | 17,640,400           | 14,824,300           | 84.04        |
| Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                  | 315,220,500          | 300,787,300          | 95.42        |
| <b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>   | <b>4,055,793,150</b> | <b>3,217,060,980</b> | <b>79.32</b> |
| <b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b> | 2,100,000            | 560,550              | 26.69        |
| Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                    | 2,100,000            | 560,550              | 26.69        |
| <b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>   | 4,053,693,150        | 3,216,500,430        | 79.35        |
| Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                  | 243,019,924          | 115,500,048          | 47.53        |
| Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah  | 522,119,476          | 403,223,026          | 77.23        |
| Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah   | 2,721,747,556        | 2,417,765,667        | 88.83        |
| Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik  | 376,364,194          | 164,334,420          | 43.66        |
| Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah   | 190,442,000          | 115,677,269          | 60.74        |
| <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>   | <b>94,406,000</b>    | <b>24,532,950</b>    | <b>25.99</b> |
| <b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>  | 94,406,000           | 24,532,950           | 25.99        |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral                                  | 41,370,000           | 4,410,000            | 10.66        |
| Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi                                 | 7,260,000            | 1,216,950            | 16.76        |
| Membangun Metadata Statistik Sektoral   | 45,776,000           | 18,906,000           | 41.30        |
| <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>  | <b>129,344,400</b>   | <b>86,057,493</b>    | <b>66.53</b> |

**Bab. III**  
**Akuntabilitas Kinerja**

|  |                      |                      |              |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>            | 129,344,400          | 86,057,493           | 66.53        |
| Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 129,344,400          | 86,057,493           | 66.53        |
| <b>JUMLAH</b>  | <b>9,322,063,991</b> | <b>7,466,714,508</b> | <b>80.10</b> |

**Tabel Realisasi Anggaran Pencapaian Kinerja**

| N<br>O | Sasaran Kinerja  | Indikator Kinerja   | Kinerja |           |              | Anggaran             |                      |              |
|--------|--|---|---------|-----------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|        |  |   | Target  | Realisasi | %<br>Capaian | Anggaran (Rp)        | Realisasi<br>(Rp)    | %<br>Capaian |
| 1      |  | 2   | 3       | 4         | 5            | 6                    | 7                    | 8            |
| 1.     | Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi pemerintahan                | Persentase Informasi dan Komunikasi Pemerintahan yang disebarakan | 70%     | 70%       | 100%         | 2,211,063,800        | 1,711,356,016        | 77.40        |
| 2.     | Meningkatnya penerapan e-Government  | Presentase perangkat daerah yang menerapkan e gov                 | 38%     | 38%       | 100%         | 4,055,793,150        | 3,217,060,980        | 79.32        |
| 3.     | Meningkatnya pengelolaan Statistik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah | Persentasi ketersediaan data statistik sektoral terintegrasi      | 100%    | 100%      | 100%         | 94,406,000           | 24,532,950           | 25.99        |
| 4.     | Meningkatnya Pengamanan Informasi dan Persandian                             | Persentase Kasus keamanan informasi yang tertangani               | 100%    | 100%      | 100%         | 129,344,400          | 86,057,493           | 66.53        |
| 5.     | Meningkatnya akuntabilitas dan Kinerja Diskominfo                            | nilai saki Diskominfo   | 79      | 81,34     | 104,3%       | <b>2,831,456,641</b> | <b>2,427,707,069</b> | <b>85.74</b> |
|        |  | persentase penyerapan anggaran                                    | 80%     | 80,10%    | 100,13%      |                      |                      |              |

**BAB IV  
PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mengaplikasikan berbagai persoalan pembangunan sebagai wujud nyata tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan transparansi sebagai nafas setiap gerak dan aktivitas pembangunan dalam upaya menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Dari hasil kinerja pada Bab III dapat disimpulkan bahwa :

semua target kinerja telah tercapai 100%, bahkan ada yang melebihi target, meskipun masih diperlukan evaluasi atau pengujian dari sisi indikator kinerja maupun cara perhitungan capaian kinerja untuk mendapatkan hasil yang dapat lebih dipertanggungjawabkan.

| N<br>O | Sasaran Kinerja  | Indikator Kinerja   | Kinerja |           |              |
|--------|--|---|---------|-----------|--------------|
|        |  |   | Target  | Realisasi | %<br>Capaian |
| 1      |  | 2   | 3       | 4         | 5            |
| 1.     | Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi pemerintahan                | Persentase Informasi dan Komunikasi Pemerintahan yang disebarakan | 70%     | 70%       | 100%         |
| 2.     | Meningkatnya penerapan e-Government  | Presentase perangkat daerah yang menerapkan e gov                 | 38%     | 38%       | 100%         |
| 3.     | Meningkatnya pengelolaan Statistik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah | Persentasi ketersediaan data statistik sektoral terintegrasi      | 100%    | 100%      | 100%         |
| 4.     | Meningkatnya Pengamanan Informasi dan Persandian                             | Persentase Kasus keaamanan informasi yang tertangani              | 100%    | 100%      | 100%         |
| 5.     | Meningkatnya akuntabilitas dan Kinerja Diskominfo                            | nilai sakis Diskominfo  | 79      | 81,34     | 104,3%       |
|        |  | persentase penyerapan anggaran                                    | 80%     | 80,10%    | 100,13%      |

Realisasi serapan anggaran per indikator sasaran mayoritas tidak mencapai 80%, secara secara kinerja anggaran masih perlu mendapatkan perhatian yang serius. Walaupun demikian disisi lain dapat dimaknai sebagai efektifitas penggunaan anggaran.

| N<br>O | Sasaran Kinerja  | Indikator Kinerja   | Anggaran             |                      |              |
|--------|--|---|----------------------|----------------------|--------------|
|        |  |   | Anggaran (Rp)        | Realisasi (Rp)       | %<br>Capaian |
| 1      |  | 2   | 6                    | 7                    | 8            |
| 1.     | Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi pemerintahan                | Persentase Informasi dan Komunikasi Pemerintahan yang disebarakan | 2,211,063,800        | 1,711,356,016        | 77.40        |
| 2.     | Meningkatnya penerapan e-Government  | Presentase perangkat daerah yang menerapkan e gov                 | 4,055,793,150        | 3,217,060,980        | 79.32        |
| 3.     | Meningkatnya pengelolaan Statistik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah | Persentasi ketersediaan data statistik sektoral terintegrasi      | 94,406,000           | 24,532,950           | 25.99        |
| 4.     | Meningkatnya Pengamanan Informasi dan Persandian                             | Persentase Kasus keamanan informasi yang tertangani               | 129,344,400          | 86,057,493           | 66.53        |
| 5.     | Meningkatnya akuntabilitas dan Kinerja Diskominfo                            | nilai sakip Diskominfo<br>persentase penyerapan anggaran          | <b>2,831,456,641</b> | <b>2,427,707,069</b> | <b>85.74</b> |

## **B. Upaya Peningkatan Kinerja**

Strategi yang akan ditempuh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam upaya mendorong peningkatan kinerja pada tahun 2023 dan sampai target akhir renstra dan RPJMD tahun 2026 sebagai berikut;

1. Melakukan langkah konkret peningkatan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung pelayanan publik;
2. Melakukan peningkatan SDM teknis bidang komunikasi dan Informatika;
3. Melakukan koordinasi dengan pengambil kebijakan anggaran dengan harapan program dan kegiatan secara optimal dapat dilaksanakan;
4. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah provinsi, kementerian atau lembaga lainnya dalam hal upaya peningkatan pelayanan;
5. Melakukan sinkronisasi/keselarasan seluruh komponen dokumen perencanaan dan penganggaran skpd;



4. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah provinsi, kementerian atau lembaga lainnya dalam hal upaya peningkatan pelayanan;
5. Melakukan sinkronisasi/keselarasan seluruh komponen dokumen perencanaan dan penganggaran skpd;
6. Melakukan kerjasama yang lebih baik dengan instansi/skpd di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Banbau, 20 Pebruari 2023  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Hulu Sungai Tengah  
DINAS  
KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA  
  
**Ir. H. AHMAD SYAHRANI EFFENDI, MT**  
NIP. 19660518 199303 1 006